

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tahun 1950 dengan Kepala Dinas yang pertama yaitu Dr. R. Soemardjono sejak 24 Februari 1993, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menempati gedung baru yang berada di Jalan Piere Tendean No. 24, Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkantor di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28h dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini menjadi unsur pokok pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 295 pegawai yang terdiri dari :

- a. Golongan IV, 37 pegawai
- b. Golongan III, 223 pegawai
- c. Golongan II, 28 pegawai
- d. Golongan I, 7 pegawai

Para pegawai tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati. Karena pegawai tersebut termasuk dalam wajib pajak maka salah satu tanggung jawab dan kewajibannya adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah digaji menurut golongan masing-masing pegawai, untuk itu pegawai sebagai wajib pajak dikenakan potongan pajak oleh bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang besarnya menurut golongan pegawai, berikut uraiannya :

- a. Golongan IV dikenakan potongan sebesar 15 %
- b. Golongan III dikenakan potongan sebesar 5%
- c. Golongan II dan I tidak dikenakan potongan

Disamping penerimaan gaji tersebut diatas para pegawai ada yang mendapatkan honor kegiatan, untuk honor kegiatan tersebut yang anggarannya dari belanja APBN pegawai dikenakan PPh pasal 21 final yang besarnya sama dengan uraian tersebut diatas.

Kontribusi pajak sangatlah penting terhadap anggaran penerimaan negara. Target penerimaan Negara masih didominasi penerimaan dari sector pajak yang mencapai sekitar 70 % dari total pendapatan Negara. Dengan adanya undang-undang pajak penghasilan, Direktorat Jendral Pajak sanat aktif melakukan progam ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak seperti progam pemberian nomor pokok wajib pajak melalui keigatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas wajib pajak. Pemahaman tentang prosedur perhitungan pajak penghasilan, prosedur pajak terutang, dan prosedur pelaporan serta pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting karena akan mempermudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan semakin tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi pula peningkatan pendapatan Negara di sektor pajak.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50% dari 295 pegawai tentang mekanisme perhitungan pajak

penghasilan, mekanisme penyetoran pajak terutang, dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi alasan mengapa penulis membuat Tugas Akhir ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PEGAWAI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan ruang lingkup penulisan, adalah :

1. Mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kelebihan dan Kelemahan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui kelebihan dan kelemahan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis yaitu:
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi Diploma III Perpajakan di Universitas Diponegoro.
 - b. Media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan pemahaman mekanisme perhitungan pajak penghasilan, mekanisme penyetoran pajak terutang dan mekanisme pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
 - c. Media dalam menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja dalam suatu perusahaan.
 - d. Sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan berkaitan dengan ilmu perpajakan.
2. Bagi Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Bagi Pihak-Pihak Lain yaitu:
 - a. Sebagai referensi penulisan Tugas Akhir yang berkaitan dengan topik bahasan pada Tugas Akhir ini.

1.5 Cara Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi serta data yang cukup dan terpercaya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka diperlukan beberapa data. Dengan data-data yang akurat dan terpercaya dapat disajikan Tugas Akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan beberapa jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, cara perolehan data primer ini adalah dengan :

a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan staf bidang pajak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang menguasai materi bahasan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Dari kegiatan wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis telah didapat data primer yakni, cara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar yang sudah dibukukan serta dipublikasikan. Cara perolehan data sekunder ini adalah dengan:

a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada pada bagian-bagian terkait.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyampaian tentang isi dari Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan Tugas Akhir. Sistematika penulisan

adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Berisi penjelasan mengenai sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah serta Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan tentang Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan, Mekanisme Penyetoran Pajak Terutang dan Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab III, serta saran dari pembahasan ini kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.